



YOGYA KEMBALI RAIH KOTA PEDULI HAM

Kesetaraan Layanan Jadi Pijakan Pemenuhan Hak

YOGYA (KR) - Untuk kesekian kalinya Pemkot Yogya meraih penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu indikator keberhasilan atas capaian tersebut ialah kesetaraan layanan yang diberikan Pemkot sehingga mampu menjadi pijakan pemenuhan hak masyarakat.

"Prestasi yang diraih ini tercapai berkat kerja keras dan kerja sama yang baik oleh perangkat-perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkot Yogya. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM dapat sungguh-sungguh terwujud nyata di Kota Yogya," ungkap Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogya Yunianto Dwisutono,

Selasa (13/12). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Dr Mualimin Abdi SH MH dalam acara Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-74 Tahun 2022 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (12/12). Pada kesempatan itu Yunianto didampingi oleh Kabag Hukum Setda Kota Yogya Nindyo Dewanto SH MHum serta jajaran Bagian Hukum Setda Kota Yogya. Hasil penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Kota Yogya mampu memenuhi hak si-

vil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Komitmen Pemkot Yogya dalam pemajuan HAM juga dibuktikan melalui sejumlah program kerja. Di antaranya seperti pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas lingkungan hidup, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan dan hak akses bagi penyandang disabilitas. Sementara Sub Koordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kota Yogya Saverius Vanny Noviandri PM SH, pihaknya sangat bersyukur memperoleh predikat Kota Peduli HAM dari pemerintah pusat. "Namun ini tidak membuat Pemkot Yogya berpuas diri, melainkan menjadi cambuk semangat untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi penghormatan,

perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Kota Yogya," urainya. Menurutnya, terdapat 10 indikator dengan 120 kriteria penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Indikator tersebut di antaranya hak atas bantuan hukum, informasi, keberagaman dan pluralisme, kependudukan, dan lain sebagainya. Sedangkan salah satu kunci utamanya ialah kesetaraan layanan yang mampu diakses oleh masyarakat. Vanny mencontohkan hak masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum. Pemkot Yogya pada tahun ini sudah menjalin kerja sama dengan 22 lembaga bantuan hukum di DIY untuk memberikan pendampingan hukum secara gratis bagi warga miskin. Oleh karena itu, warga kurang mampu yang tersandung masalah hukum tidak perlu



Yunianto Dwisutono bersama Nindyo Dewanto dan jajaran Bagian Hukum Setda Kota Yogya menunjukkan piagam. khawatir. "Biasanya kan kalau masyarakat yang kurang mampu langsung pasrah kalau tersandung dengan kasus hukum karena persoalan biaya yang tidak sedikit. Sehingga lewat program layanan ini kami harap jaminan masyarakat untuk mendapat pemenuhan hak hukum bisa terpenuhi," tandasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005